

# HUKUM & ETIKA JURNALISME

Pertemuan 1

*Isti Purwi Tyas Utami, M.Ikom*



# JURNALISME IDEAL



- *"Meriam telah membunuh feodalisme, tetapi tintalah yang akan membunuh masyarakat modern"* (Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis).
- Jurnalis mengemban tujuan mulia (*noble purpose*)
- Kerja jurnalistik tidak dapat hanya dipandu oleh kekuatan ekonomi dan kepentingan khusus.
- *"Jurnalisme selalu merupakan pekerjaan bagi orang-orang etis "* (Leslie H. Whitten, novelis).

# KRISIS KEPERCAYAAN PADA MEDIA & JURNALIS (Kim Otto, Andreas Köhler)

Tiga dimensi utama perdebatan sehubungan dengan hilangnya kepercayaan terhadap media:

- Etika dan norma
- Faktor-faktor pengaruh
- Populisme

TRUST → "dasar dari hubungan sosial antar warga negara" → warga negara yang berpengetahuan adalah kunci demokrasi yang berfungsi dengan baik.



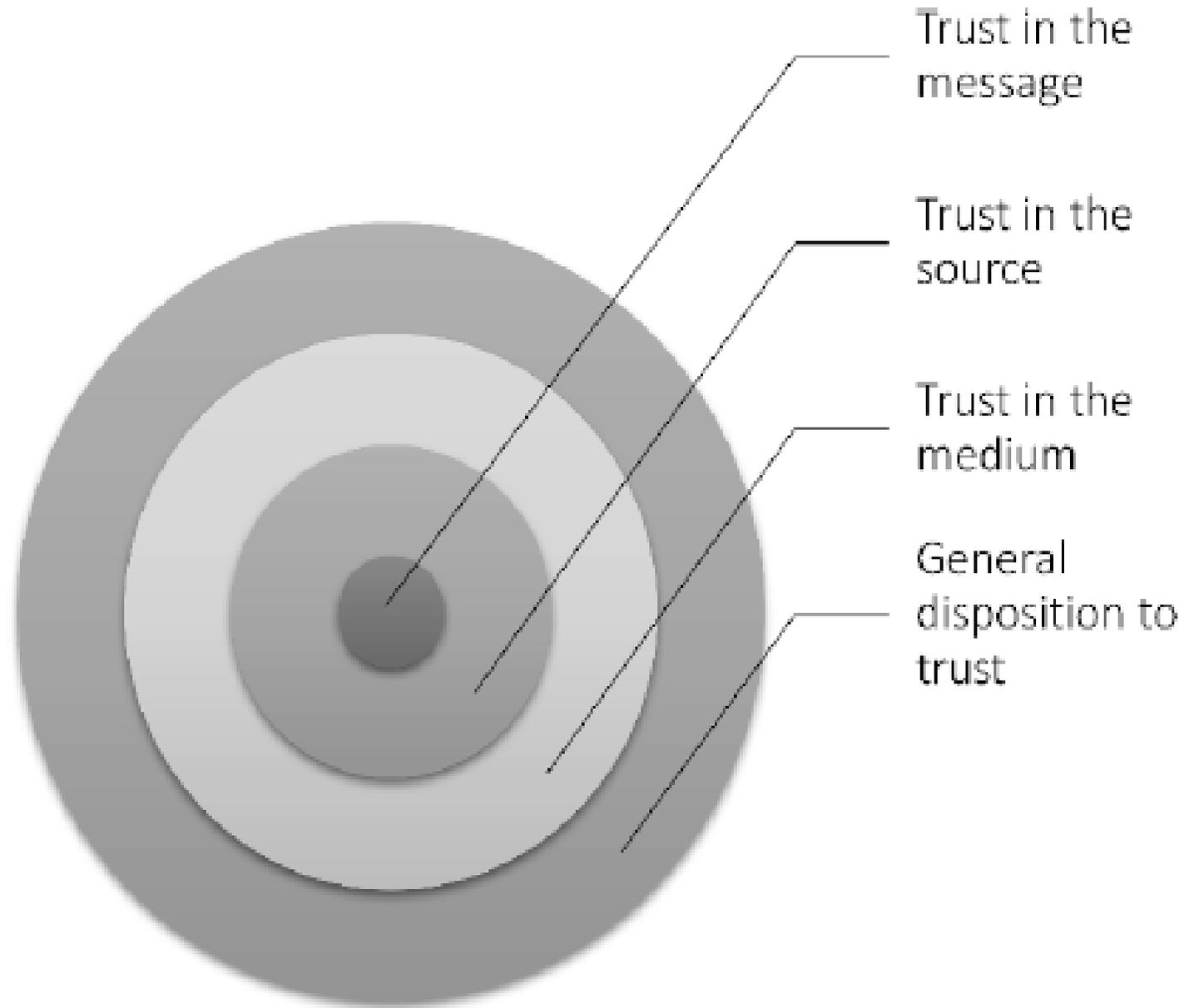
# FUNGSI JURNALISME IDEAL

(Kim Otto,  
Andreas Köhler)

- Membentuk kepercayaan dan diekspresikan dalam harapan audiens terhadap tindakan dan kinerja jurnalisme (Kohring, 2004: 141). Karena itu, kepercayaan pada jurnalisme didasari oleh selektivitas jurnalistik.
- Kohring (2002, 105) mendaftarkan empat faktor yang dihasilkan dari kinerja sistem jurnalisme:
  - Percaya pada selektivitas tematik
  - Percaya pada selektivitas faktual
  - Percaya pada kebenaran faktual
  - Percaya pada evaluasi eksplisit

Verifikasi merupakan praktik profesional sentral jurnalisme yang memisahkannya dari produk informasi lain seperti hiburan, propaganda, seni atau fiksi murni (Kovach & Rosenstiel, 2001, hal. 71).

ASPEK-ASPEK  
REFERENSI  
KEPERCAYAAN  
KHALAYAK  
(Lucasen &  
Schraagen, 2012)



# PENGERTIAN HUKUM & ETIKA

## HUKUM:

- **Aristoteles** → Kumpulan dari berbagai peraturan yang bukan hanya memiliki sifat mengikat namun juga hakim bagi masyarakat, yang mana hakim diawasi oleh berbagai UU ketika menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum.
- **Plato** → Suatu peraturan yang disusun secara sistematis dan baik yang memiliki sifat mengikat hakim serta masyarakat
- **Drs. E. Utrecht, S.H** → Hukum ialah suatu himpunan dari segala peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah serta larangan yang mengatur tata tertib di kehidupan masyarakat dan harus di patuhi pada setiap individu di dalam masyarakat tersebut
- **Hukum Pers: menjamin dan melindungi kebebasan berbicara.**

# PENGERTIAN HUKUM & ETIKA

## ETIKA

- **K. Bertens** → Nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku.
- **Prof. DR. Franz Magnis Suseno** → Ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia.

ETIKA PROFESI → Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kel. masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk kel. masyarakat atau profesi itu sendiri yang terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengemban profesi tersebut.

# SEJARAH HUKUM & ETIKA JURNALISME

Stephen J. Ward menyatakan sejarah perkembangan etika jurnaisme dapat dibagi dalam 5 tahap:

- Tahap I → Abad 16-17 , diskursus etis jurnalisme di Eropa Barat; paska penemuan mesin cetak Gutenberg, para redaktur koran perlu menjamin mencetak berita benar.
- Tahap II → Tercipta “Etika Publik”, banyaknya media di era pencerahan menjadikan pers sebagai institusi sosial yang diakui, memiliki kebebasan yang dijamin konstitusi dan pilar ke-4 demokrasi.
- Tahap III → Muncul teori liberal, pers yang bebas dan independen perlu bagi perlindungan publik.
- Tahap IV → perkembangan dan kritik terhadap pers liberal dengan penekanan pada jurnalisme obyektif dan tanggung jawab sosial. Jurnalisme profesional objektif berkembang.
- Tahap V → tahap multimedia atau media campuran, diskursus seputar hakikat jurnalisme dan peran jurnalis.

# SEJARAH HUKUM & ETIKA JURNALISME INDONESIA

## PRA REFORMASI

- Ada SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).
- SIUPP bisa dicabut, populer dengan istilah Breidel (Pernah menimpa INDONESIA RAYA, TEMPO, DETIK, MONITOR)
- Pers dlm tekanan penguasa
- Kooptasi kekuasaan terhadap pers
- Terror & kekerasan terhadap wartawan

## PASCA REFORMASI

- UU No. 44 Tahun 1999 Ttg Pers Tidak Perlu ada SIUPP untuk mendirikan perusahaan pers
- UU PERS belum sepenuhnya digunakan
- Masih digunakan KUHP dalam kasus-kasus Pers

# NORMA HUKUM BERKAITAN DENGAN PERS

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights 1948)
  - *Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).*
- Konvensi Hak-Hak Sipil & Politik (The International Convention on Civil & Political Rights, 1966)



# NORMA HUKUM BERKAITAN DENGAN PERS

- Pasal 28 F UUD 1945 hasil amandemen:  
*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*



# NORMA HUKUM BERKAITAN DENGAN PERS

- TAP MPR XVII MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia
  - Pasal 20
  - *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
  - Pasal 21
  - *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*



NORMA  
HUKUM  
BERKAITAN  
DENGAN PERS

- UU Hak Azasi Manusia Pasal 23 (2)  
*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa*



# PRODUK HUKUM PERS

## UNDANG-UNDANG

- UU No.40 tahun 1999 tentang Pers
- UU No.10 tahun 2008 tentang transaksi elektronik
- UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran

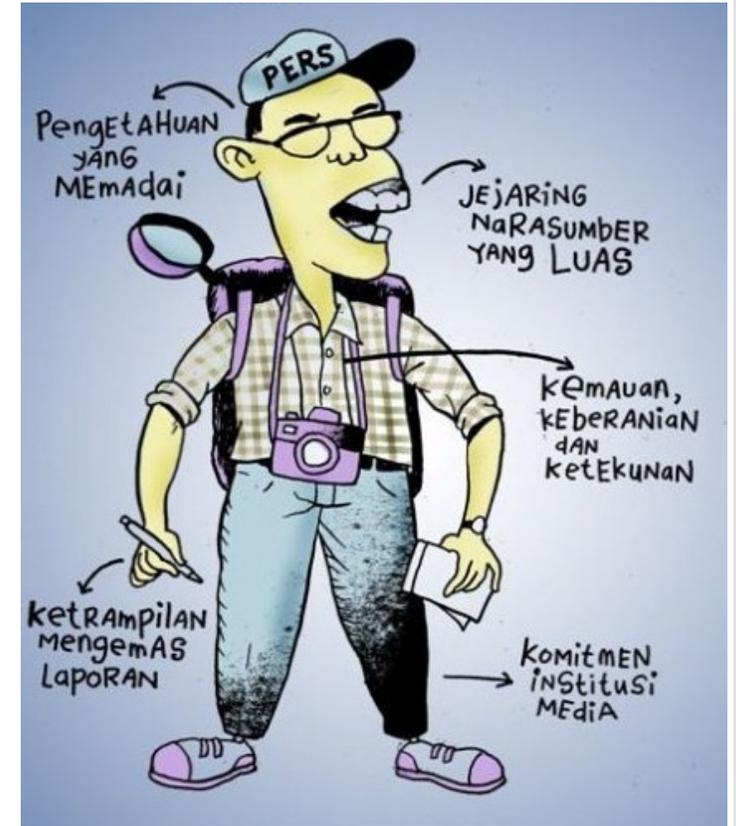
## REGULASI:

- Peraturan Dewan Pers No.3 (Standar organisasi perusahaan pers)
- Peraturan Dewan Pers No.5 (Standar organisasi perlindungan wartawan)
- Peraturan Dewan Pers No.6 (Kode etik jurnalistik)
- Peraturan Dewan Pers No.9 (Pedoman hak jawab)
- Peraturan Dewan Pers No.8 (Pedoman penyebaran media cetak dewasa)



# UU 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

- Wartawan dan Pers adalah pihak yang menjalankan upaya pemenuhan hak warga negara atas "hak atas informasi" dan "hak untuk mengetahui" (Pasal 6)
- Karena itu media wartawan tidak boleh dipidana (Pasal 50 KUHP), "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana"
- Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber.



# BATASAN KEBEBASAN?

- Hak orang lain
  - Hak atas privasi
  - Hak atas nama baik
  - Hak untuk tidak difitnah
  - Hak untuk anggota keluarga dan orang dekat tidak diserang bila tidak ada kaitan dengan kasus
  - Hak untuk didengarkan
- Emmanuel Levinas menulis 'Sebagai jejak yang Yang Tak Terbatas (*the infinite*), wajah orang lain tidak akan dapat dibunuh atau dihancurkan' (Tjaya : 2012)



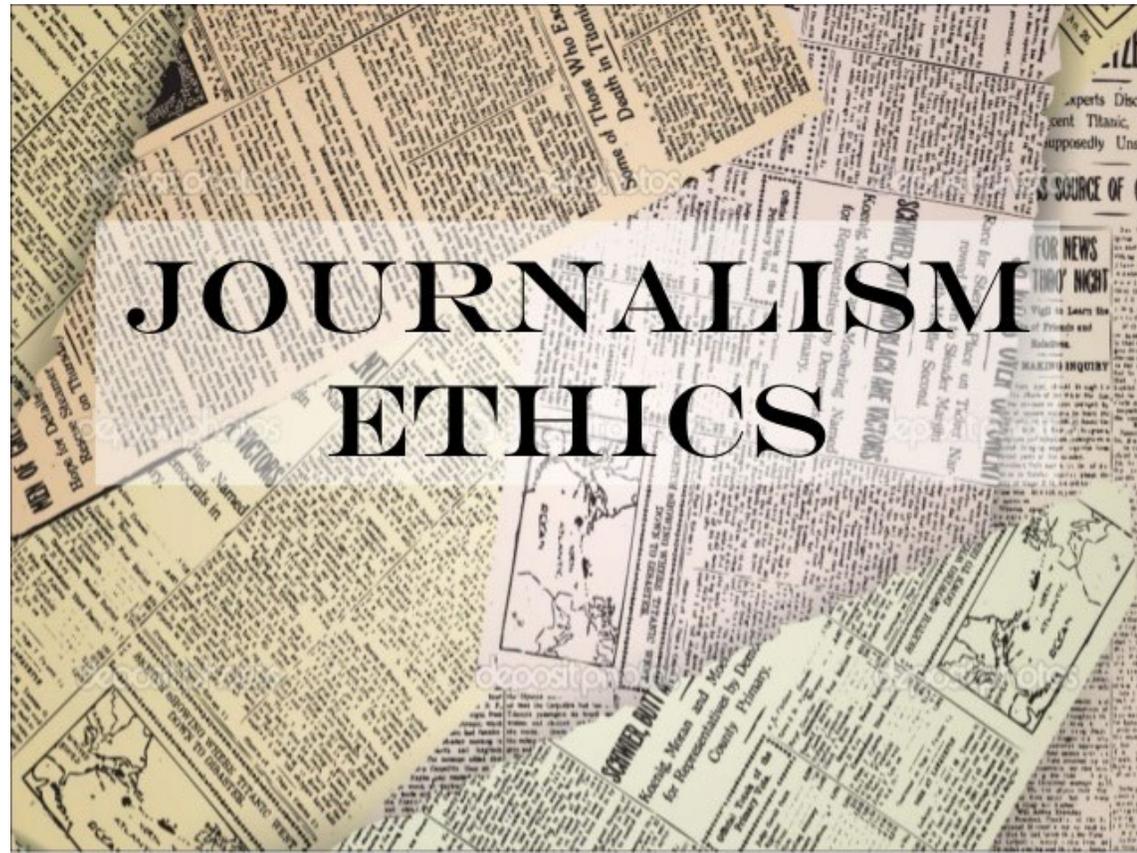
# TINDAK PIDANA PERS

- Penghinaan → Pasal 310 (2) KUHP
- Fitnah → Pasal 311 KUHP
- Penghinaan ringan → Pasal 315 KUHP
- Pornografi → Pasal 282 (2) & 533 KUHP
- Penghasutan → Pasal 160 KUHP
- Pernyataan kebencian/ permusuhan terhadap pemerintah → Pasal 154 KUHP , terhadap golongan tertentu → Pasal 156 KUHP



# ETIKA JURNALISME

- Cabang etika khusus atau etika terapan yang menganalisis, mengevaluasi nilai, prinsip dan norma moral terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jurnalis.
- Penerapan beberapa teori etika normatif (Etika Teleologis, Etika Deontologis, Etika Keutamaan dan Etika Kepedulian).



# LEVEL ETIKA JURNALISME

Level etika jurnalistik :

- Level mikro
- Level makro

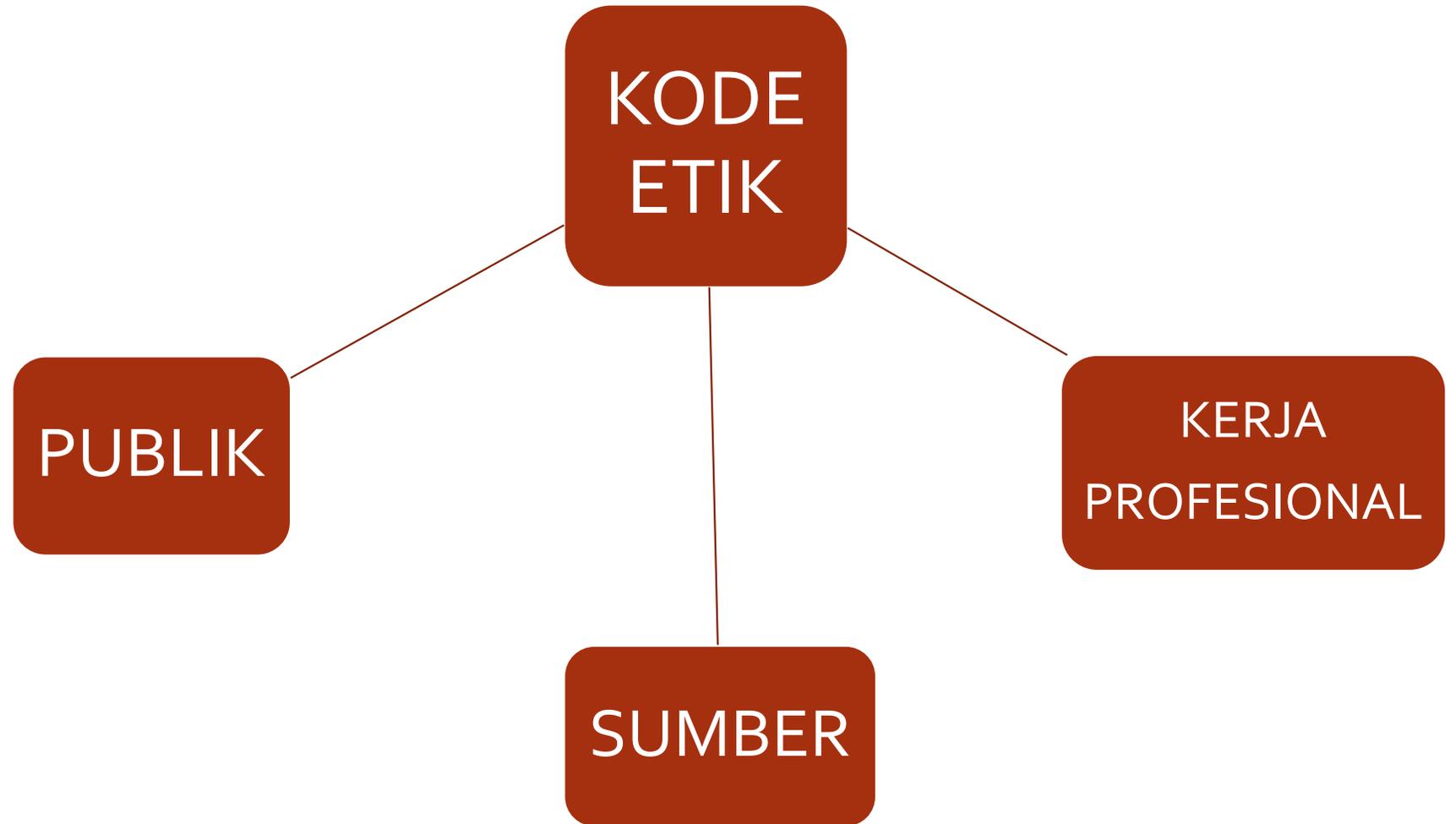


# NORMA ETIS JURNALIS INDONESIA

- Kode etik jurnalistik → rambu-rambu etis bagi jurnalis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- KEJ yang berlaku disyahkan Dewan Pers (2006) sebagai revisi dari KEWI (1999)
- KEJ berisi 11 pasal dan ditandatangani 29 organisasi wartawan dan pers Indonesia.



RUANG  
LINGKUP  
KODE ETIK  
JURNALISTIK



# 11 MUATAN BATANG TUBUH KEJ

Pasal 1

- Cara menjalankan profesi

Pasal 2

- Sikap menjalankan profesi

Pasal 3,4,5,6,7,8,

- Cara mengolah dan memuat berita

Pasal 7,8 dan 9

- Cara melindungi nara sumber

Pasal 10 dan 11

- Cara menyelesaikan masalah

## 2 MUATAN PENUTUP KEJ

Alinea 1

- Penilaian akhir atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh Dewan Pers

Alinea 2

- Sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers

# 10 ELEMEN JURNALISME

(Bill Covach &  
Tom Rosenstiel)

1. Tugas utama jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran.
2. Loyalitas utama wartawan adalah pada warga masyarakat.
3. Esensi jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
4. Praktisi jurnalistik harus independen dalam menyajikan apa yang diliput.
5. Jurnalisme harus berfungsi sebagai pengawas kekuasaan.



## Akhir Perjuangan Suami yang Obati Istrinya dengan Ganja, Fidelis Bebas dari Penjara

Kompas.com - 16/11/2017, 14:50 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



Fidelis Arie Sudewarto (36) ditemani anak pertamanya Yuvensius Finito Rosewood dan kakak kandungnya Yohana LA Suyati saat melihat berkas surat bebas di Bapas Sintang, Kamis (16/11/2017). (KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN)

Penulis: **Kontributor Pontianak, Yohanes Kurnia Irawan** | Editor: Erwin Hutapea



**SINTANG, KOMPAS.com** - Raut wajah **Fidelis** tampak ceria. Sorot matanya tajam. Janggut tipis terlihat menghiasi senyumnya hari ini. Di balik senyuman itu, ada pengorbanan besar yang harus ditebusnya.



Mengenakan kemeja batik berwarna gelap, celana hitam, dan sepatu kulit berwarna hitam, Fidelis datang ke Balai Pemasarakatan Klas II Sintang didampingi kedua anak dan keluarganya, serta tim kuasa hukum pada Kamis (16/11/2017). Hari ini pula, status narapidana yang disandangnya berakhir.

Iklan ditutup oleh Google

Stop lihat iklan ini

Mengapa iklan ini? 

## Dewan Pers: Banyak Media Tak Berimbang dalam Pemberitaan Pemilu

Reporter: **Antara**

Editor: **Tulus Wijanarko**

Rabu, 16 Januari 2019 17:08 WIB

0 KOMENTAR

 | 30

 | 1

 | 32



Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian (ISPP) bertemu dengan Dewan Pers di gedung Dewan Pers, Jakarta, 4 Oktober 2017. Pertemuan ini membahas artikel "Musuh dalam selimut KPK" di majalah TEMPO. Tempo/Ilham Fikri

**TEMPO.CO, Jakarta** - Dewan Pers menyatakan masih banyak media yang tidak berimbang dalam memberitakan masa kampanye **Pemilu** Presiden dan Legislatif 2019. "Selama enam bulan terakhir ada 16 media yang telah diadukan kepada kami karena pemberitaannya tidak berimbang," Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, di Surabaya, Selasa, 15/1.

TERPOPULER

# 10 Hoaks Sepanjang 2018 yang Paling Berdampak di Masyarakat

Kompas.com - 19/12/2018, 15:13 WIB

BAGIKAN:



Komentar



Ilustrasi hoaks (Thinkstock)



Penulis: **Mela Armani** | Editor: **Bayu Galih**

**KOMPAS.com** - Kabar **hoaks** atau berita bohong memang masih dengan mudahnya kita temukan di media sosial maupun melalui pesan berantai di aplikasi percakapan.

## 3 Media dibredel Soeharto karena berita korupsi kapal perang

Jumat, 30 Agustus 2013 11:21

Reporter : **Mustiana Lestari**



14

SHARES



Kapal perang Amerika. dailymail.co.uk

**Merdeka.com** - Sekitar tahun 90-an, ramai kasus pembredelan tiga media oleh Presiden **Soeharto** kerana memberitakan ada dugaan mark-up dalam pembelian kapal perang Jerman Timur. Bahkan kala itu, di tiga media tersebut ikut terseret

# 10 ELEMEN JURNALISME (Bill Covach & Tom Rosenstiel)

6. Jurnalisme merupakan forum publik, menyediakan ruang untuk kritik dan tanggapan untuk khalayak.
7. Jurnalisme harus mampu menyajikan berita yang memikat dan relevan.
8. Jurnalisme harus menyajikan berita yang proporsional dan komprehensif.
9. Praktisi jurnalistik memiliki kewajiban mendengarkan hati nurani.
10. Warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban terkait dengan berita, terlebih di era digital dimana mereka dapat menjadi produser sekaligus editor secara mandiri.





## Luna Maya Adukan Radar Bogor dan C&R Dewan Pers Selesaikan melalui Mediasi dan Keluarkan PPR



Dewan Pers menyelesaikan pengaduan Luna Maya terhadap Radar Bogor ini melalui mediasi dan adjudikasi yang digelar di Bandung pada 5 Februari 2016. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terkait sengketa Luna Maya dengan C&R tertanggal 11 Februari 2016.

Artis itu mengadukan Radar Bogor terkait berita berjudul: "Harga Short Time Nikita Rp 65 Juta. Biasadipesan Direktur dan Pejabat", (edisi 12 Desember 2015). Dalam berita tersebut, dinyatakan harga-harga artis termasuk didalamnya pengadu. Dari hasil klarifikasi yang digelar di Ibukota Jawa Barat itu, Dewan Pers menilai Radar Bogor melanggar Pasal 1,2,3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena berita yang dibuat tidak akurat, tidak menggunakan sumber yang kredibel, tidak profesional, tidak uji informasi, menghakimi dan berita (infografis) bohong.

CARI BERITA

Cari Judul

### KATEGORI

Berita Dewan Pers

Berita Pemerintah

Sorotan Media

# Hakim Menangis dan Minta Maaf Hukum Nenek Pencuri Singkong Ini Karena Lapar

Rabu, 7 September 2016 07:59



Facebook/Noviani Zain



BANGKAPOS.COM - Hukum di negara ini memang terkadang menimbulkan kontroversi.

Official Store Tokopedia

Dapatkan Produk Asli Pilihanmu di Official Store Tokopedia. Raih Diskon Dari 50%-90% tokopedia

## Referensi

- Otto, Kim., Köhler, Andreas (eds). 2018. Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe. Springer VS.
- Kovach, Bill. Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of Journalism. Three Rivers Press.
- Siregar, RH., Ignatius, Haryanto. 2006. Membangun Kebebasan Pers yang Beretika. Dewan Pers, Yayasan Tifa.